

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO**

Jouke Lasut

Abstrak : Ketidakberhasilan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya ialah faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui hubungan antara implementasi kebijakan Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Penelitian ini menggunakan metode Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif . populasi Penelitian ini diwilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo . Pengambilan sample lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik random samgling sebanyak 5 Desa dari 20 Desa.

Hasil Penelitian menunjukkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah mempunyai hubungan pengaruh positif dengan perbandingan 1 : 0,73 yaitu bertambahnya kebijakan pengembangan SDM sebesar 1 satuan akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut sebesar 0,73 satuan atau 73 % .

Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Ketika kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan selama pelita satu dan pelita kedua yang menekankan pada dimensi ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dinilai kurang berhasil membawa perbaikan nasib masyarakat lapisan bawah, maka sejak awal pelita ketiga pemerintah melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan pembangunan nasional yang ditandai dengan perbaikan skala prioritas trilogy pembangunan nasional menjadi pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijakan ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya delapan jalur pemerataan. Tujuan utama dari kebijakan tersebut

adalah agar pembangunan nasional dapat dinikmati secara lebih merata oleh semua lapisan masyarakat rerutama: pada masyarakat lapisan bawah sebagai upaya perbaikan kondisi kehidupan mereka disegaia bidang baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sejak pelita ketiga telah diluncurkan berbagai kebijakan yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai program yang langsung ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah, seperti antara lain: Program perluasan pelayanan perkreditan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk Kredit Canda Kukai (KCK), Kredit Bimas, dan lain- lain; Program pembangunan infrastruktur

ekonomi rakyat kecil terutama infrastruktur pertanian; Program pembinaan keiembagaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, seperti program pengembangan wilayah (PPW), Program Bimbingan Masai (BIMAS), Program peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K); Program peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui program Inpres Desa Tertinggal, Program kredit usaha Tani (KUT), berbagai program lainnya.

Semua program yang cenderung lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas tersebut oleh banyak kalangan dinilai belum memberikan hasil optimal didalam memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menjadi sasarannya. Data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1993 mengemukakan bahwa sampai dengan akhir peiita V masih terdapat 1 27 juta atau 1 15 % dari Penduduk Indonesia pada saat itu yang masih hidup didalam kemiskinan khususnya kemiskinan ekonomi (BPS, 1993). Jumlah penduduk ini justru terus meningkat terutama setelah bangsa Indonesia mengaiami krisis ekonomi padatahun 1996.

Ketidakberhasilan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya ialah faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Rendahnya kuaiitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah tersebut menyebabkan mereka tidak dapat mengelola dengan baik bantuan-bantuan pemerintah tersebut.

Oleh karena itu dapat dipahami kalau pemerintah sejak Pelita VI kembali melakukan koreksi kebijakan pembangunan nasional. Hal ini jelas tercantum dalam GBHN tahun 1993 sebagai berikut :

Titik berat pembangunan Jangka Panjang II diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilakukan secara seiring, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional “.

Kebijakan pembangunan nasional yang memperhatikan aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut terus dilanjutkan pelaksanaannya dalam masa pembangunan di era reformasi sekarang ini, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN 1999 sebagai berikut: "Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral etikanya".

Para ahli teori pembangunan di bidang sumber daya manusia berpendapat bahwa perbaikan "human capital" memberikan kontribusi yang besar bagi kenaikan laju pembangunan, karena itu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjaminkan kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. Oleh sebab itu menurut teori ini bahwa investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan "physical capital

stock tetapi juga human capital stock dengan mengambil prioritas pada usaha peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, gizi. Dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan sikap kewiraswastaan, dengan demikian produktivitas manusia akan meningkat, (Hidayat, 1978). berhasil dengan baik tanpa dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat tersebut. Sebab permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat lapisan bawah tidak semata-mata hanya kekurangan modal, tetapi juga tidak adanya kemampuan mengelola usaha produktif yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Fenomena seperti yang digambarkan di atas nampak dialami oleh masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin di kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data prasurvei di kecamatan tersebut terdapat 3.518 keluarga miskin (prasejahtera) atau 24,2% dari jumlah kepala keluarga yang ada, dan sebanyak 4.877 keluarga atau 33,58% masih tergolong pada keluarga sejahtera tahap I. Masyarakat yang pra sejahtera dan sejahtera tahap I tersebut pada umumnya tidak memiliki

pendidikan yang memadai, tidak mempunyai ketrampilan yang cukup untuk melakukan usaha, mempunyai derajat kesehatan dan gizi yang rendah. Berdasarkan pengamatan bahwa penyebab rendahnya kondisi ekonomi masyarakat tersebut tidaklah semata-mata disebabkan oleh tidak adanya aset produksi, melainkan juga karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki seperti rendahnya pengetahuan, ketrampilan, gizi, dan lain-lain.

Seperti diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir ini telah banyak program-program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan terhadap masyarakat lapisan bawah, seperti antara lain: Bertitik tolak dari kebijakan-kebijakan pembangunan dan teori yang dikemukakan di atas maka dapatlah dikatakan bahwa kebijakan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah tidak akan Program pengadaan berbagai pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha melalui bimbingan dan penyuluhan, program perbaikan sanitasi, keluarga berencana, pengembangan kewirausahaan, dan lain sebagainya yang dilakukan sejalan dengan berbagai

program yang langsung terkait dengan perbaikan ekonomi masyarakat miskin sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Program-program seperti ini telah banyak dilakukan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia tersebut telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah, khususnya di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Dengan mengetahui hal tersebut maka akan ditentukan langkah-langkah untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia masyarakat lapisan bawah yang dilakukan selama ini.

METODOLOGI PENELITIAN

A Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil sampel beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Pengambilan sampel lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 5 Desa dari 20 Desa yang ada di kecamatan tersebut. Adapun desa-desa yang terpilih ialah: Hutabohu, Tenilo, Bolihuangga, Kayubulan dan Hutuo.

Populasi (subyek) penelitian ialah warga masyarakat (keluarga - keluarga) petani kecil dan nelayan kecil yang keseluruhannya berjumlah 8.210 kepala keluarga . Pengambilan sampel responden dilakukan secara random sampling . Sedangkan penentuan besar atau jumlah sampel responden adalah dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendy (1989) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{n(D)^2 + 1}$$

Dimana :

n = besar I jumlah sampel responden ;

N = besar! jumlah populasi ;

D = presisi , yaitu sebesar 10 %

Dengan menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang kepala keluarga. Jumlah sampel tersebut sebanyak 20 orang kepala keluarga pada tiap desa sampel .

B. Definisi Operasional Variabel penelitian

Variabel - variabel penelitian ini terdiri dari “ kebijakan pengembangan sumber daya manusia “ adalah sebagai variabel independen bebas , dan “ kondisi ekonomi masyarakat ” adalah sebagai variabel dependen terikat . Dalam rangka penelitian atau pengumpulan data , maka variabel - variabel penelitian tersebut

didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

(1) Kebijakan Pengembangan SDM (Variabel Bebas):

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sini didefinisikan sebagai semua program - program atau kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan usaha pengembangan atau peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kecil yang tidak berkemampuan , seperti program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha bekerja melalui latihan - latihan ataupun; bimbingan dan penyuluhan ; program pengembangan kewirausahaan ; program peningkatan kesehatan dan gizi keluarga ; program perbaikan mutu lingkungan hidup ; dan lain - lain program yang dapat meningkatkan kemampuan berproduksi masyarakat . Atas dasar perumusan operasiona! tersebut maka variabel ini diamati I diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Isi kebijakan meliputi : kesesuaian dan ketepatan jenis program atau kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat kelompok

sasaran kebijakan/ program tersebut ; kemanfaatan jenis program yang dilakukan

- Implementasi atau pelaksanaan kebijakan , meliputi : mekanisme pelaksanaan program/ kegiatan , metode atau pelaksanaan , dan frekuensi pelaksanaannya.

(2) Kondisi Ekonomi Masyarakat (Variabel Terikat) :

Kondisi ekonomi masyarakat yang dimaksudkan di sini ialah tingkat kemampuan masyarakat (keluarga) dalam meningkatkan pendapatannya atau kemampuan daya belinya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan hidup yang pokok (makan , sandang , rumah tempat tinggal, kesehatan, pendidikan), maupun kebutuhan sosial — psikologis dan perkembangan (interaksi dalam keluarga , informasi , transportasi , hiburan, dan lain — lain yang bersifat sekunder). Atas dasar definisi operasional tersebut , maka variabel tingkat kondisi ekonomi masyarakat (keluarga) diamati dari beberapa indikator sebagai berikut :

- Besar Pendapatan/ penghasilan keluarga per tahun ;
- Besar pengeluaran/ belanja keluarga per tahun ;

- Besar saving/ tabungan keluarga per tahun ;

C. Instrumen Dan Cara Pengumpulan data

Data tentang variabel - variabel penelitian ini adalah jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden . Untuk mengumpulkan data tersebut maka digunakan instrumen penelitian berupa seperangkat kuisisioner atau daftar pertanyaan , dan disertai dengan wawancara (interview guide). Daftar pertanyaan disusun dalam bentuk angket berstruktur dengan menggunakan skala ordinal .

Selain data primer tersebut juga diambil data sekunder sebagai pendukung . untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian dokumentasi yaitu mengambil data yang telah tersedia dilokasi penelitian (kantor Camat atau kantor Kepala Desa atau kantor instansi lain yang terkait). Pengumpulan data tersebut di atas dilakukan dengan cara survei dan dibantu dengan metode observasi .

D. Cara Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus — rumus statistik sebagai berikut :

- (1) Statistik Deskriptif , yaitu digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan SDM . Dan kondisi

ekonomi masyarakat (responden) dengan cara menghitung persentase dari tiap - tiap kategori untuk masing - masing variabel tersebut . Persentase dihitung dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana :

p = nilai persentase;

f = frekuensi distribusi responden menurut kategori pada masing-masing variabel ;

n = total sampel (responden).

- (2) Statistik Inferensial atau Parametrik ;
- a. Analisis Regresi Linear , yaitu digunakan untuk menguji pengaruh variabel pengembangan SDM terhadap variabel peningkatan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat (responden) . Rumus analisis adalah yang dikemukakan oleh Sudjana (1990) sebagai berikut :

$$Y = a+bx$$

Dimana :

Y = regresi variabel Kondisi Ekonomi (Y)

Atas variabel—variabel pengembangan SDM (X).

- a. = nilai konstan variabel Kondisi Ekonomi masyarakat(X) yang dihitung dengan rumus :

$$a = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{ \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \}}}$$

b = nilai koefisien regresi variabel kondisi Ekonomi Masyarakat (Y) atau variabel Pengembangan SDM (X), yang dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Selanjutnya , untuk mengetahui signifikan ini digunakan uji statistik — F Varians.

- b. Analisis Korelasi Sederhana ; yaitu digunakan untuk mengetahui derajat korelasi (hubungan) dan besar daya penentu (determinasi)
 Dari variabel pengembangan SDM terhadap variabel peningkatan kondisi ekonomi masyarakat . Rumus korelasi yang digunakan ialah Korelasi product Momen yang dikemukakan oleh Sudjana (1990) sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - \sum X^2}}$$

Selanjutnya , untuk mengetahui signifikan linieritas regresi digunakan uji Statistik - F yang dirancang dalam Tabel Analisis Varians . Untuk mengetahui signifikan korelasi digunakan uji statistik -t .

E. Kriteria Pengujian Hipotesis

Semua hipotesis yang diajukan I diuji pada penelitian ini akan di uji pada taraf signifikansi 0,01 ((1 1 %) ; artinya hipotesis akan dinyatakan teruji I diterima secara meyakinkan apabila hasil - hasil analisis data berada pada taraf signifikan 0,01 atau pada taraf kepercayaan 0, 99 .

PEMBAHASAN

Hasil-hasil analisis statistic memberikan petunjuk atau gambaran mengenai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh atau kontribusi dari kebijakan pengembangan sumber daya manusia masyarakat lapisan bawah terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat tersebut . Namun demikian , agar hasil penelitian tersebut dapat memberikan makna yang lebih jelas maka perlu dilakukan pembahasan dengan mengkaji kembali berdasarkan kerangka teori yang dipakai sebagai landasan teoritik dari penelitian ini .

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi obyek penelitian ini adalah program - program yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam rangka mengembangkan kualitas pengetahuan , keterampilan , dan kesehatan ,

masyarakat lapisan bawah sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya . Program - program tersebut meliputi baik berupa pelatihan — pelatihan ketrampilan berusaha maupun program dibidang perbaikan kesehatan dan gizi termasuk perbaikan kondisi lingkungan hidup masyarakat . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa isi dan implementasi kebijakan atau program - program tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan telah dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka serta telah cukup memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan , ketrampilan dan kesehatan mereka sehingga mereka dapat melakukan kegiatan usaha I pekerjaan dengan lebih baik dan lebih produktif , dan dengan demikian kondisi ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik atau meningkat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan atau program — program pengembangan SDM tersebut telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat Iapisan bawah , maka analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa ternyata kontribusinya adalah sangat signifikan .

Dari analisis korelasi telah diperoleh nilai koefisien determinasi atau daya penentu dari kebijakan pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga masyarakat lapisan bawah adalah sebesar 52,18 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan pengembagan SDM masyarakat Iapisan bawah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah memberikan kontribusi sebesar 52,18 % terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat tersebut . Besarnya kontribusi tersebut adalah signifikan pada taraf uji 1 % , sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi kebijakan pengembangan SDM terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga masyarakat Iapisan bawah adalah sangat berarti , sehingga tidak dapat diabaikan.

Kesimpulan hasil analisis korelasi tersebut didukung oleh hasil analisis regresi linier sederhana . Dari analisis regresi linier di dapat persamaan regresi dari kebijakan pengembangan SDM terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat adalah $Y = 12,52 + 0,73 X$. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (b) adalah sebesar 0,73 yang artinya bahwa kebijakan pengembangan SDM mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kondisi

ekonomi keluarga masyarakat Iapisan bawah dengan perbandingan sebesar 1 : 0,73 . Bahwa apabila kebijakan pengembangan SDM bertambah dengan 1 satuan atau skala maka kondisi ekonomi keluarga masyarakat lapisan bawah akan bertambah besar sebesar 0,73 atau 73 % . Besar pengaruh tersebut adalah sangat nyata /berarti dan berpola linier karena uji F menunjukkan nilai F hitungan yang ternyata lebih kecil dari nilai F - kritik pada taraf uji 1 % . Adanya pengaruh yang nyata dari kebijakan pengembangan SDM terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat tersebut juga ditunjukkan oleh nilai koefisien konstan (a) sebesar 12,52 yang artinya apabila kebijakan pengembangan SDM tidak bertambah (tetap) maka kondisi ekonomi masyarakat tersebut hanya akan ada sebesar 12,52 %.

Keseluruhan hasil penelitian yang dijelaskan diatas memberi petunjuk bahwa kebijakan atau program - program pengembangan SDM masyarakat Iapisan bawah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah memberi kontribusi yang nyata dan berarti (signifikan) terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat tersebut . Adanya peningkatan kondisi ekonomi keluarga masyarakat Iapisan bawah sebagai kontribusi dari implementasi kebijakan pengembangan

SDM tersebut telah dideskripsikan dalam analisis dalam analisis statistik deskriptif pada tabel 5.1 di atas . Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar (responden 64 %) telah menyatakan peningkatan kondisi ekonomi mereka adalah cukup berarti dan :ukup dirasakan , dan bahkan sebanyak 18 % responden menyatakan berarti dan banyak dirasakan peningkatannya . Jadi, walaupun peningkatan kondisi ekonomi masyarakat tersebut tidak semuanya adalah sebagai kontribusi dari kebijakan pengembangan SDM , akan tetapi setidaknya — tidaknya peningkatan itu sebesar 52, 18 % adalah merupakan kontribusi dari adanya kebijakan pengembangan SDM kepada mereka . oleh karena itu hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa kebijakan Jembangan SDM mempunyai hubungan dan memberikan pengaruh yang aerarti terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga masyarakat lapisan bawah , ternyata adalah benar.

Dengan menerima kebenaran hipotesis tersebut maka secara sekaligus menerima kebenaran teori pengembangan SDM sebagaimana telah diuraikan pada bab kerangka teori dari skripsi ini . Paling tidak , iengan terujinya hipotesis tersebut maka penelitian ini dapat mendukung teori — teori pengembangan

sumber daya manusia yang telah diuraikan dalam bab kerangka teori diatas . Karena dalam teori sumber daya manusia dikemukakan bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan , pelatihan ketrampilan , kesehatan dan gizi akan menimbulkan inisiatif - inisiatif sehingga produktivitas akan meningkat (Hidayat , dalam tjokroamidjojo , 1986).

Implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah bahwa pengembangan sumber daya manusia yang intinya adalah investasi human cagital mutlak harus dilakukan sejalan dengan kebijakan pembangunan lainnya

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia masyarakat lapisan bawah adalah program — program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan berproduksi manusia sehingga kondisi ekonomi masyarakat tersebut akan menjadi lebih baik atau meningkat. Cakupan pengembangan sumber daya manusia tersebut meliputi pendidikan , latihan

keampilan, kesehatan, gizi, pengembangan interpreneuril atau kewirausahaan, dan lain-lain yang dapat mengembangkan mutu sumber daya manusia.

2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, berdasarkan penelitian ini telah dirasa cukup manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat tersebut dalam memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3. Kontribusi pengaruh kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil terhadap peningkatan kondisi ekonomi mereka. Masyarakat tersebut adalah nyata dan signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil - hasil analisis data berikut ini :

a. Koefisien determinasi sebesar $r^2 = 52,18\%$ pada taraf signifikan 0,01 yang artinya bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia mempunyai pengaruh atau daya penentu sebesar 52,18% terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah

b. Koefisien regresi $Y = 12,52 + 0,73X$, yang artinya bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah mempunyai hubungan pengaruh positif dengan perbandingan 1 : 0,73 yaitu bertambahnya kebijakan pengembangan SDM sebesar 1 satuan akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut sebesar 0,73satuan atau 73%.

4. Atas dasar hasil penelitian tersebut diatas maka hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia mempunyai hubungan dan memberikan kontribusi pengaruh yang berarti terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah, terbukti secara sangat meyakinkan.

B. Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian tersebut maka dapatlah dinyatakan bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu kepada para policy maker pembangunan baik ditingkat pusat (pemerintah pusat) maupun ditingkat

daerah (pemerintah daerah) perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan kepada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil perlu dilanjutkan dan ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya . Peningkatan secara kuantitas artinya program - program yang sudah ada perlu ditambah dengan program - program lainnya . Sedangkan peningkatan kualitas , artinya program - program yang telah ada perlu ditingkatkan mutu pelaksanaannya .
2. Agar implementasi kebijakan atau program-program pengembangan sumber daya manusia tersebut menjadi lebih efektif , maka perlu peningkatan pengawasannya . Ini penting karena tidak berhasilnya implementasi kebijakan atau program - program pembangunan pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah ,seringkali bersumber dari adanya penyimpangan-penyimpangan pada implementasinya dilapangan .
3. Koordinasi juga penting untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan . Karena itu koordinasi antara instansi - instansi ataupun

pejabat-pejabat pelaksana program pengembangan SDM masyarakat lapisan bawah perlu ditingkatkan .

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiman, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta : PT. Gramedia
- Biro Pusat Statistik, 1993, Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : BPS Pusat
- Bintoro Tjokroamidjojo & Mustapadidjaja, A.R, 1996, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung
- Djoko Suseno, 1994, Kualitas Sumber daya Manusia Masyarakat Nelayan, Yogyakarta : UGM Press.
- Effendi Tadjudin, 1993 Sumber daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, Yogyakarta : Tiara wacana Yogya.
- Emil salim, 1976, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta : UI — Press.
- Hidayat, 1976, Kerangka Kerja Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi : Pendekatan Sumber Daya Manusia, Dalam ekonomi Keuangan Nomor 4 Desember 1979
- Moeljarto Tjokrowinoto, 2001, Pembangunan : Dilema dan

- Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjiwati Sayogyo. 1983., Garis Kemiskinan dan Minimum Kebutuhan Pangan, Makalah : Jakarta
- Islamy Irfan, 1986. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1976, Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang , Jakarta : LP3 ES .
- Sutrisno Hadi , 1986 , Methodologi Research , Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM .
- Suroto , 1986 , Strateqi Pembangunan dan Perencanaan Tenaqa Kerja , Yogyakarta : UGM—Press.
- Soekidjo Notoatmodjo 1992 , Pengembangan Sumber Dava Manusia , Jakarta : Rineke Cipta .
- Sudjana , 1990 , Metoda statistika , Bandung : PT. Tarsito
- Todaro Michael 1983 , Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , terjemahan, Jakarta: LPFE - UI
- Tjotoherijanto (editor) , 1982 , Sumber Daya"Manusia , Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi , Jakarta : FE - UI .
- Vidhyandika Moeljarto & Sonia Prabowo , Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan Sosial , dalam analisis CSIS No. 1 Tahun 1997.
- Lain - Lain :
- GBHN Tahun 1993 dan GBHN Tahun 1999
 - Buku Kecamatan Limboto Dalam Angka Tahun 2002
 - Buku Monografi Kecamatan Limboto Tahun 2000